



MINIM: Petugas parkir mengarahkan bus menuju tempat kosong di Parkiran Senopati, Gondomanan, Jogja. Lokasi ini menjadi salah satu dari 700 titik parkir resmi yang menerapkan pembayaran digital.

Baru Sasar 10 dari 700 Titik Resmi

Digitalisasi Parkir Sulit untuk Diterapkan Menyeluruh

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bakal mendigitalisasikan pembayaran parkir. Namun untuk diterapkan secara menyeluruh bakal sulit terwujud pada tahun ini.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, sampai saat ini baru ada 10 titik parkir yang menerapkan pembayaran digital lewat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Titiknya tersebar di Jalan Prof Yohanes, Urip Sumoharjo, Diponegoro, Brigjen Katamso, Mataram, Laksda Adisucipto, KH Ahmad Dahlan, dan Limaran. Kemudian di Tempat Khusus Parkir (TKP) Senopati dan TKP Ngabean.

Diakuinya, jumlah itu memang terbilang masih sangat sedikit. Sebab ada total 700 titik parkir resmi di Kota Jogja. Sehingga juru parkir (jukir) yang sudah menggunakan QRIS baru sekitar 1,43 persen.

Oleh karena itu, Hasto mendorong agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja segera melakukan percepatan. Lantaran digitalisasi pembayaran parkir merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kasus parkir *nuthuk*.

"Saya sudah minta agar dipercepat, secepat-cepatnya," tegas Hasto saat ditemui di Balai Kota Jogja Senin (28/7).

Meskipun akan dipercepat, Hasto mengakui pesimistis, penerapan parkir digital bisa diterapkan secara menyeluruh tahun ini. Sebab ada berbagai

tahapan yang harus dilalui.

Namun, hingga akhir tahun dia yakin penerapan pembayaran parkir digital bisa menyentuh angka 80 persen. Seiring dengan itu, Pemkot juga akan melakukan penataan parkir liar.

"Sampai akhir tahun kalau 100 persen berat, 80 persen saya kira sudah bagus," kata Hasto.

Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho menyampaikan, penerapan pembayaran parkir digital melalui proses panjang. Misalnya harus ada tahap diskusi dengan para jukir agar menyetujui program tersebut.

Arif mengaku, dalam digitalisasi pembayaran parkir di Kota Jogja pihaknya tidak akan memaksa para jukir. Namun lebih kepada pendekatan kepada para jukir untuk bersama-sama mewujudkan budaya perparkiran yang lebih baik.

"Kami mengobrol panjang dengan jukir, mengajak berdiskusi, dan yang sepuluh (jukir dengan QRIS, Red) itu bukan dipaksa," katanya.

Sementara itu, salah satu jukir di kawasan Kota-baru Triwanto mengaku, tidak menolak digitalisasi pembayaran parkir. Sebab hal tersebut akan mempermudah pembayaran dari masyarakat kepada jukir atau penyedia jasa parkir.

Namun, Triwanto berharap ada sosialisasi dari pemerintah kepada para jukir. Sebab selama ini dirinya juga belum pernah mengetahui secara rinci penerapan sistem tersebut. "Kalau saya setuju-setuju saja, yang penting ada sosialisasi agar kami juga memahami," bebarnya. **(tnu/eno/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005